BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Kajian Pustaka

1. Kerukunan Beragama di dalam Kehidupan Masyarakat

Rukun berasal dari bahasa arab yaitu "ruknan" yang artinya asas atau dasar, seperti rukun Islam. Kerukunan dalam artian obyektif adalah baik atau damai. Kerukunan hidup umat beragama berarti hidup dalam suasana damai, tidak bertengkar walaupun berbeda agama. Kerukunan umat beragama adalah program pemerintah, yang mencakup semua warga Negara Indonesia.

Pada tahun 1967 diadakan musyawarah antar umat beragama, Persiden Suharto dalam musyawarah tersebut menyatakan antara lain:

> "pemerintah tidak akan menghalang-halangi penyebaran suatu agama, dengan syarat penyebaran tersebut ditujukan kepada masyarakat Indonesia yang belum beragama. Kepada pemuka agama dan masyarakat supaya mempunyai jiwa toleransi terhadap sesama umat beragama".

Kerukunan umat beragama bertujuan untuk memotivasi dan mendinamisasikan semua umat beragama untuk ikutserta dalam pembangunan bangsa.

Adapun landasan-landasan dalam kerukunan umat beragama antara lain :

a. Landasan Idiil, yaitu sila pertama dari pancasila (ketuhanan yang maha Esa)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Landasan konstitusional yaitu undang-undang dasar 1945, pasal 29 ayat 1, "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Dan pasal 29 ayat 2:"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai dengan agamanya dan kepercayaanya"

c. Landasan strategis yaitu ketetapan MPR: IV, tahun : 1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Dalam GBHN dan Program pembangunan nasional, tahun 2000, Dinyatakan bahwa :

> Pembangunan bidang agama adalah untuk dapat terciptanya suasana kehidupan Beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang penuh keimanan dan ketakwaan, penuh kerukunan yang dinamis antar umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, secara bersama-sama memperkuat landasan spiritual, moral dan etika bagi pembangunan nasional, yang tercermin dalam suasana kehidupan yang harmonis, serta dalam kukuhnya kesatuan dan persatuan bangsa selaras dengan penghayatan dan pengamalan pancasila.[17]

Dalam kehidupan manusia tidak akan lepas dari berbagai macam hubungan atau interaksi sosial, yang kemudian memberikan suatu kontribusi untuk melakukan pertukaran satu dengan yang lain, dengan demikian terjadilah pemenuhan kebutuhan untuk bersosialisasi yang bersifat ekonomis maupun psikologis atau di dunia kerja, keluarga maupun bermasyarakat dan berkelompok sehingga tidak jarang menimbulkan konflik, yang bahkan terkadang membawa atribut-atribut keagamaan.

---

[17] laporan tahunan kehidupan beragama di indonesia, 2011. html (http://www.pdii.lipi.go.id/read/2012/05/10)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pantauan The Wahid Institute sepanjang tahun 2010 menemukan 63 kasus pelanggaran kebebasan beragama. Ironisnya, pelaku pelanggaran kebebasan beragama paling banyak justru pemerintah daerah dan kepolisian (72 persen). Bentuk pelanggaran yang dilakukan meliputi pembatasan dan pemaksaan untuk meninggalkan keyakinan tertentu (25 kasus atau 40 persen), pencabutan izin atau pelanggaran menggunakan rumah ibadah (19 kasus atau 30 persen), serta pembiaran tindak kekerasan oleh kelompok masyarakat terhadap umat beragama (14 kasus atau 22 persen).

Tabel 2.2

Kasus pelanggaran kebebasan beragama

No	Bentuk Pelanggaran	Jumlah Kasus	Prosentase
01	Pembatasan dan pemaksaan untuk meninggalkan keyakinan	25 Kasus	40 %
02	Pencabutan atau pelanggaran menggunakan rumah ibadah	19 Kasus	30 %
03	Pembiaran tindak kekerasan	14 Kasus	22 %

Sumber : The Wahid Institut tahun 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muncul kemudian adalah bagaimana membangun harmoni kerukunan umat beragama agar tindak intoleransi dapat ditekan pada tahun mendatang.

a. Persaingan Non Agama

Setiap terjadi konflik antar umat beragama, kita mengalami kesulitan untuk menemukan akar pokok penyebabnya. Bahkan penyebab utamanya seringkali berakar bukan pada aspek doktrin yang merupakan inti agama, melainkan pada akar serabut non-teologis, terutama pada persaingan politik dan ekonomi dari para elite pemimpinnya.

Dengan demikian, pemicu utama dari setiap konflik antar agama bukan karena perbedaan doktrin ajaran, tetapi lebih pada perbuatan pengaruh politik dan ekonomi dari masing-masing pemeluknya. Watak dari konflik antar agama cenderung mengabaikan kualitas kesalahan individu yang dimusuhi dan bahkan yang sering terjadi adalah baik yang memerangi maupun yang diperangi sama-sama rendah kualitas keberagamaannya.

Di sini yang menjadi garis pembeda hanyalah sebuah sikap dan sebuah kategori yang sangat artifisial dan menyesatkan, yaitu setiap orang yang dianggap "bukan kelompok kita" harus dimusyawarahkan. Dalam artian lain prasangka akan muncul jika mereka bukan kelompok.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena konflik agama sifatnya sangat emosional dan destruktif maka emosi massa yang terlibat akan sangat mudah dikorbankan dengan cara dihasut.

Bagi pihak yang merasa dirugikan sulit untuk berdamai sebelum melakukan pembalasan setimpal, sedangkan pihak yang merasa unggul akan semakin agresif agar lawan benar-benar lumpuh, sehingga peluang pembalasan semakin menyempit.

Semangat untuk saling memusnahkan akan bertambah ketika faktor keyakinan ikut andil, yaitu anggapan siapa yang berhasil membunuh lawan berarti pintu surga sudah menunggu. Demikian kompleksnya pertikaian antaragama sehingga setiap konflik antar agama cenderung merusak prinsip-prinsip keadilan dan Hak Asasi Manusia.

Konflik antar agama yang dibumbui oleh motif ekonomi dan politik hanya akan semakin memperkeruh situasi kebangsaan. Situasi kebangsaan Indonesia sudah saatnya dibangun dengan suasana tenang dan damai. Jika kedamaian dicederai dengan berbagai urusan politik (kekuasaan) dan ekonomi maka persoalan keagamaan hanya dijadikan kedok kebrutalan pihak-pihak yang tidak bertangung jawab.

b. Piagam Madinah

Namun demikian, intoleransi keagamaan yang terjadi di Indonesia menjadi senjakala dan sekaligus ujian umat beragama. Apa yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini merupakan potret betapa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelompok minoritas masih dianggap asing. Kelompok minoritas belum diterima dengan baik oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat masih menganggap kelompok minoritas sebagai ancaman bagi kehidupan umat beragama.

Padahal kelompok minoritas wajib dilindungi sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Dalam konsepsi Islam (Piagam Madinah) misalnya, Nabi Muhammad melarang umat Islam memusuhi dan memerangi kaum kafir dhimi (kelompok minoritas Madinah kala itu). Jika mereka dimusuhi maka ia akan berhadapan langsung dengan Nabi Muhammad.[18]

Menilik semangat Piagam Madinah dalam membangun masyarakat madani ini maka tidak ada pembedaaan antara minoritas dan mayoritas. Semua umat beragama mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Semua umat beragama sama di hadapan Tuhan, yang membedakan hanyalah kualitas keimanan dan pengabdian kepada Tuhannya.

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan wajib memberikan kemudahan bagi umat beragama beribadat secara tenang tanpa tekanan. Salah satunya dengan mempermudah pendirian rumah ibadah tanpa syarat yang neko-neko dan njlimet, serta menjamin kebebasan guna melaksanakan agama sebagaimana amanat UUD 1945.

---

[18] Beni s. harmoni kerukunan beragama (http://bennisetiawan.blokspot.com) Diposkan oleh Benni Setiawan di Jumat, Desember 31, 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peristiwa intoleransi tidak boleh terulang di kemudian hari. Sudah saatnya semua pihak sadar bahwa kerukunan umat beragama merupakan modal sosial bangsa Indonesia. Jika hal ini tercederai oleh kelompok-kelompok yang mengaku beragama, maka perlu dipertanyakan komitmen mereka terhadap agama yang mereka yakini.

Dan jika pemerintah membiarkan hal ini tetap terjadi maka kondisi kebangsaan Indonesia akan runtuh karena sikap pemerintah yang tidak tegas dan membiarkan masyarakatnya "berperang" atas nama agama.

2. Pengertian dan Ciri-ciri Masyarakat Multikultural

Masyarakat Multikultural sebagaimana telah banyak diketahui, bahwa masyarakat merupakan kategori yang paling umum untuk menyebut suatu kumpulan manusia yang saling berinteraksi secara kontinyu dalam suatu wilayah atau tempat dengan batas-batas geografik, sosial, atau kultural yang tertentu. Terdapat istilah-istilah yang lebih khusus yang digunakan untuk menyebut pengumpulan manusia dengan karakteristik tertentu. Misalnya yang menekankan bahwa interaksi yang terus-menerus itu berlangsung dalam batas-batas wilayah geografik tertentu, sehingga orang-orang dalam batas wilayah itu saling berinteraksi secara lebih intensif daripada dengan orang-orang yang berada diluar batas itu. Pengelompokan yang demikian ini disebut komunitas, atau masyarakat setempat. Misalnya masyarakat desa atau masyarakat kota. Juga dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam lingkup ruang geografik yang lebih kecil, misalnya Rukun Tetangga, Rukun Kampung, dusun, dan sebagainya.

Untuk wilayah sosial, dapat berupa kelas atau kelompok sosial tertentu. Misalnya untuk yang berjenjang dapat berupa kelas atas, kelas menengah, atau kelas bawah, sedangkan yang tidak berjenjang dapat juga kelompok kiri, kanan, atau tengah, berbagai kelompok profesi, atau sebagaimana diungkapkan Geertz, ada kelompok santri, priyayi, atau abangan. Untuk kategori wilayah kebudayaan, dapat berupaka suku bangsa atau kelompok-kelompok agama.

Istilah *plural society*, pertama kali digunakan oleh JS Furnival untuk menyebut masyarakat-masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih tertib sosial, komunitas atau kelompok-kelompok yang secara kultural, ekonomi dan politik terpisah-pisah serta memiliki struktur kelembagaan yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya, atau dengan kata lain merupakan suatu masyarakat dimana sistem nilai yang dianut oleh berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagiannya adalah sedemikian rupa sehingga para anggotanya kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai keseluruhan.

Istilah plural atau majemuk sebenarnya berbeda dengan pengertian heterogen. Majemuk atau plural itu merupakan lawan dari kata singular atau tunggal. Sehingga, masyarakat plural itu bukan masyarakat yang tunggal. Masyarakat tunggal merupakan masyarakat yang mendukung satu sistem kebudayaan yang sama, sedangkan pada masyarakat plural, di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalamnya terdapat lebih dari satu kelompok baik etnik maupun sosial yang menganut sistem kebudayaan (*subkultur*) berbeda satu dengan yang lain. Sebuah masyarakat kota, mungkin tepat disebut sebagai masyarakat heterogen, sepanjang meskipun mereka berasal dari latar belakang SARA (suku bangsa, agama, ras, dan aliran atau golongan-golongan) yang berbeda, tetapi mereka tidak mengelompok berdasarkan SARA tersebut. Heterogen lawan dari kondisi yang disebut homogen. Disebut homogen kalau anggota masyarakat berasal dari SARA yang secara relatif sama. Disebut heterogen kalau berasal dari SARA yang saling berbeda, namun mereka tidak mengelompok (tersegmentasi) berdasarkan SARA tersebut.

Selanjutnya, suatu masyarakat disebut multikultural, majemuk, atau plural apabila para anggota-anggotanya berasal dari SARA yang saling berbeda, dan SARA tersebut menjadi dasar pengelompokan para anggota masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdiri atas dua atau lebih kelompok etnis maupun sosial yang didasarkan pada SARA yang pada umumnya bersifat primordial, dan masing-masing mengembangkan subkultur tertentu. Interaksi antar-kelompok lebih rendah daripada interaksi internal kelompok. Bahkan, di dalam banyak masyarakat majemuk, struktur sosial yang ada sering bersifat konsolidatif, sehingga proses menuju integrasi sosialnya terhambat.

Agar lebih jelas, berikut dikemukakan ciri masyarakat multikultural menurut Van Den Berghe.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Mengalami segmentasi kedalam kelompok-kelompok dengan subkultur saling berbeda.
b. Memiliki struktur yang terbagi ke dalam lembaga-lembaga yang nonkomplemen.
c. Kurang dapat mengembangkan konsensus mengenai nilai dasar.
d. Relatif sering mengalami konflik.
e. Secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan.
f. Ketergantungan ekonomi.
g. Dominasi politik oleh suatu kelompok terhadap kelompok yang lain.

a. Konfigirasi Masyarakat Multicultural

Furnival mengemukakan bahwa apabila dilihat dari konfigurasi etnis atau kelompok yang menjadi unsurnya, paling tidak terdapat empat macam masyarakat majemuk, yaitu:

1) Masyarakat majemuk dengan kompetisi seimbang.

   Di antara kelompok-kelompok yang ada, masing-masing mempunyai kekuatan kompetisi yang seimbang, tidak ada satupun kelompok yang dapat menguasai yang lain. Integrasi sosial sebagai sebuah masyarakat besar tidak mudah terjadi, kecuali kalau ada di antara kelompok-kelompok tersebut yang berhasil membangun koalisi lintas kelompok, misalnya lintas etnik yang membentuknya.

2) Masyarakat majemuk dengan konfigurasi maioritas dominan.

   Di antara kelompok-kelompok yang ada terdapat satu kelompok besar dan berkuasa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Masyarakat majemuk dengan konfigurasi minoritas dominan.

Di antara kelompok-kelompok yang ada terdapat satu kelompok yang kecil tetapi berkuasa

4) Masyarakat majemuk dengan konfigurasi fragmental

Terdiri atas kelompok-kelompok kecil yang satu dengan yang lain saling terpisah dan sangat terbatas interaksi dan komunikasinya. Sama dengan konfigurasi kompetisi seimbang, masyarakat majemuk jenis ini pun integrasi sosial hanya dapat dicapai apabila terjadi koalisi lintas etnis.

b. Faktor-faktor Peyebab Kemajemukan

Selaian diatas ada beberapa factor yang mendasari kemajemukan yang terjadi di Indonesia. Meskipun menurut sejarah, masyarakat Indonesia relatif berasal dari nenek moyang yang sama, tetapi karena keadaan geografiknya, akhirnya masyarakat Indonesia bersifat majemuk. Kondisi geografik yang menjadi penyebab kemajemukan masyarakat, adalah :

1) Bentuk wilayah yang berupa kepulauan. Kondisi ini mengakibatkan, meskipun berasal dari nenek moyang yang sama, tetapi akhirnya mereka terpisah-pisah di pulau-pulau yang saling berbeda, sehingga masing-masing terisolasi dan mengembangkan kebudayaan sendiri. Jadilah masyarakat Indonesia mengalami kemajemukan ethnik atau sukubangsa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Letak wilayah yang strategis, di antara dua benua dan dua samudera, kondisi ini mengakibatkan Indonesia banyak didatangi oleh orang-orang asing yang membawa pengaruh unsur kebudayaan, antara lain yang paling menonjol adalah agama. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat Indonesia majemuk dalam hal agama. Lima agama besar dunia ada di Indonesia. Lima agama besar yang dimaksud adalah :

(a) Hindu (pengaaruh India).

(b) Budha (pengaruh bangsa-bangsa Asia).

(c) Katholik (pengaruh kedatangan bangsa portugis).

(d) Kristen (pengaruh kedatangan bangsa Belanda).

(e) Islam (pengaruh masuknya para pedagang dari Timur Tengah).

3) Variasi iklim, jenis serta kesuburan tanah yang berbeda di antara beberapa tempat, misalnya daerah Indonesia bagian Timur yang lebih kering, tumbuh menjadi sukubangsa peternak, daerah Jawa dan Sumatra yang dipengaruhi vulkanisme tumbuh menjadi daerah dengan masyarajat yang hidup dari bercocok tanam. Variasi iklim dan jenis serta kesuburan tanah ini mengakibatkan masyarakat Indonesia majemuk dalam hal kultur, antara lain cara hidup.

c. Bentuk Struktur Sosial Masyarakat Majemuk

1) Struktur sosial yang terinterseksi (*intersected social structure*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelompok-kelompok sosial yang ada dalam masyarakat dapat menjadi wadah beraktivitas dari orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang sukubangsa, agama, ras, dan aliran.

Dalam bentuk struktur sosial yang demikian keanggotaan para anggota masyarakat dalam kelompok sosial yang ada saling silang-menyilang sehingga terjadi loyalitas yang juga silang menyilang (*cross-cutting affiliation dan cross-cutting loyalities*). Bentuk struktur yang terinterseksi mendorong terjadinya integrasi sosial dalam masyarakat multicultural.

2) Struktur sosial yang terkonsolidasi (*consolidated social structure*).

Dalam bentuk struktur yang demikian, kelompok-kelompok sosial yang ada hanya mewadahi orang-orang yang berlatar belakang sukubangsa, agama, ras, atau aliran yang sama. Sehingga terjadi tumpang tindih parameter dalam pemilahan struktur sosial. Orang Bali akan identik dengan orang Hindu, orang Melayu identik dengan orang Islam. Partai tertentu identik dengan orang Islam, partai yang lain identik dengan orang Kristen, dan seterusnya.

Bentuk struktur sosial yang semacam ini akan menghambat terjadinya integrasi sosial dalam masyarakat multicultural, karena akan terjadi pertajaman prasangka antar-kelompok. Struktur sosial terpilah dengan parameter yang tumpang tindih, pemilahan berdasarkan sukubangsa tumpang tindih dengan pemilahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasrkan agama, ras, aliran, atau kelas-kelas sosial dan ekonomi. Ikatan dalam kelompok dalam akan sangat kuat, tetapi akan menimbulkan prasangka terhadap kelompok luarnya.

d. Perilaku dalam masyarakat multikultural

Dalam kehidupan masyarakat multikultural, sering tidak dapat dihindari berkembangnya faham-faham atau cara hidup yang didasarkan pada *ethnosentrisme*, *primordialisme*, aliran, *sektarianisme*, dan sebagainya.

1) *Ethnosentrisme* merupakan faham atau sikap menilai kebudayaan sukubangsa atau kelompok lain menggunakan ukuran yang berlaku di sukubangsa kelompok/masyarakat sendiri
2) *Primordialisme* merupakan tindakan memperlakukan secara istimewa (memberi prioritas) orang-orang yang latarbelakang sukubangsa, agama, ras, aliran atau golongan yang sama dalam urusan publik.
3) *Kronisme* merupakan memprioritaskan teman. *Nepotisme* yaitu memprioritaskan anggota keluarga.
4) Politik aliran merupakan kehidupan perpolitikan yang didasarkan pada faktor-faktor primordial (SARA).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Prasangka dan stereotipe ras atau etnis adalah penilaian suatu ras atau etnis berdasarkan pendapat orang banyak yang belum pernah dibuktikan tetapi dianggap benar.[19]

e. **Proses Integrasi dalam Masyarakat Multikultual**

Integrasi sosial tidak hanya sebuah ungkapan normatif, melainkan juga telah lama menjadi persoalan akademik.

Secara sosiologis, terdapat dua pendekatan:

1) Konsensus yang lebih menekankan pada dimensi budaya (*teori struktural fungsional*)
2) Konflik yang lebih menekankan dimensi struktural (*teori struktural konflik*).

Menurut pendekatan konsensus integrasi dapat dicapai melalui suatu kesepakatan tentang nilai dasar (*common platform*); sedangkan menurut pendekatan konflik, integrasi hanya dapat dicapai melalui dominasi satu kelompok atas lainnya. Integrasi sosial dalam masyarakat majemuk dipengaruhi oleh beberapa hal misalnya:

(1) Struktur sosialnya, apakah interseksi atau konsolidasi.

(2) Faham atau ideologi, yang berkembang dalam masyarakat apakah ethnosentrisme, primordialisme, aliran, sektarianisme dan lain-lain, ataukah faham relativisme kebudayaan.

(3) Dapat berlangsung koalisi.

---

[19] Erwien T. "Ciri-ciri masyarakat multikultural"http://Erwientriyasa.Blogspot.Com, (diakses 1 juni 2000)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(4) Dapat membangun konsensus tentang nilai dasar.

(5) Berlangsung proses-proses menuju akulturasi budaya majemuk

(6) Kelompok dominan.

Struktur sosial yang bersifat intersected, berkembangnya faham relativisme kebudayaan, koalisi lintas-etnis, konsensus tentang nilai dasar, akulturasi budaya majemuk, dan adanya kelompok dominan merupakan faktor-faktor yang mendorong berlangsungnya integrasi sosial dalam masyarakat majemuk.

3. Kerangka Teoritik

a. Kajian Teori Fungsionalisme Struktural (Talcott Parsons)

Dalam penelitian yang kami lakukan, kami memberikan suatu kerangka teori yang akan kami jadikan pedoman untuk dapat menganalisa dan mengelola data. *Teori fungsionalisme struktural* dari Talcot Parsons yang kami pilih, karena dalam beberapa hal yang menyangkut data yang kami peroleh dari lapangan pemikiran penting dari Talcot Parsons bisa sedikit membatu peneliti untuk dapat menyelesaikan dan mengetahui bagaiman bentuk dan ekspresi kerukunan beragama masyarakat komplek Mangga yang mempunyai budaya, agama, bahasa daerah, asal, dan pekerjaan yang berbeda-beda bisa berinteraksi dengan tenang dan damai.

Evolusi sosial kultural, seperti evolusi biologis, berkembang menurut cara-cara sendiri mulai dari bentuk yang sederhana sampai kebentuk yang lebih kompleks. Berbeda dengan konsep awal, evolusi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak bergerak dalam satu jalur tunggal yang dapat di ketahui, tetapi disetiap tingkat terdapat beragam tipe serta bentuk yang berbeda. Walau demikian perspektif yang lebih dini membuktikan bahwa bentuk-bentuk yang sama dalam tahap tertentu teryata memiliki perbedaan potensi yang memacu perkembangan evolusi sealanjutnya. Sungguhpun begitu ragam pola tindak tanduk manusia merupakan satu dari berbagai fakta kondisi manusia itu.[20]

Parson melihat sistem sosial sebagai satu dari tiga cara dimana tindakan sosial dapat terorganisir. Dan juga terdapat dua sistem tindakan lain yang saling melengkapi yaitu : sistem kultural yang mengandung nilai dan simbol-simbol serta sistem kepribadian para pelaku individual

Parson juga sangat terikat dengan sistem sosial dimana masyarakat merupakan sistem sosial yang dilihat secara total. Sistem sosial juga bisa dihubungkan dengan individu dan menganalisanya dengan melalui konsep status dan peran. Status merupakan kedudukan dalam sistem sosial seperti guru, ibu, pegawai pemerintah, RT dan juga RW. Sedangkan peranan merupakan prilaku yang harapkan atau prilaku yang melekat dari status sebagai guru, ibu, pegawai pemerintah, RT, dan juga RW.

Pokok pikiran penting dari Talcott Parsons tentang Teori Struktural Fungsional meyangkut tentang fungsi, suatu fungsi itu

---

[20] Margaret paloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta,PT RajaGrafindo Persada, 2000). Hal : 167

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri adalah kumpulan kegiatan yang di tujukan kearah pemenuhan kebutuhan tertentu atau sistem. Dengan menggunakan definisi ini, Parsons yakin bahwa ada empat fungsi penting yang diperlukan semua sistem yaitu adaptation(A), goal attainmen (G), integration (I), dan latens (L):

1) AGIL
   a) Adaptasi (*Adaptation*) : Supaya masyarakat bisa bertahan dia harus mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan dirinya.
   b) Pencapai Tujuan (*Goal Attainment*) : Sebuah sistem harus mampu menentukan tujuannya dan berusaha mencapai tujuan-tujuan yang telah dirumuskan itu.
   c) Integrasi (*Integration*) : Masyarakat harus mengatur hubungan di antara komponen-komponennya supaya dia bisa berfungsi secara maksimal.
   d) Latensi atau pemeliharaan pola-pola yang sudah ada: Setiap masyarakat harus mempertahankan, memperbaiki dan memperbaharui baik motivasi individu-individu maupun pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi-motivasi itu.
2) Sistem Tindakan
   a) Sistem budaya, dalam sistem ini, unit analisis yang paling dasar adalah tentang "arti" atau "sistem simbolik". Beberapa contoh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

dari sistem-sistem simbolik adalah kepercayaan religius, bahasa dan nilai-nilai.

b) Sistem sosial, adalah interaksi antara dua individu atau lebih individu di dalam suatu lingkungan tertentu. Tetapi interaksi itu tidak terbatas antara individu-individu melainkan juga terdapat antara kelompok-kelompok, institusi-institusi, masyarakat-masyarakat dan organisasi-organisasi.

c) Sistem kepribadian. Kesatuan yang paling dasar dari unit ini adalah individu yang merupakan actor atau pelaku. Pusat perhatiannya dalam analisa ini adalah kebutuhan-kebutuhan, motif-motif dan sikap-sikap, seperti motivasi untuk mendapat kepuasan atau keuntungan.

d) Sistem organisme atau aspek biologis manusia. Kesatuan yang paling dasar dalam sistem ini adalah manusia dalam arti biologis, yakni aspek fisik dari manusia itu.

3) Skema Tindakan

a) Pelaku atau Aktor: Aktor atau pelaku ini dapat terdiri dari seorang individu atau suatu kolektivitas.

b) Tujuan (*Goal*): Tujuan yang ingin dicapai biasanya selaras dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

c) Situasi: Tindakan untuk mencapai tujuan ini biasanya terjadi dalam situasi. Hal-hal yang termasuk dalam situasi adalah prasarana dan kondisi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Standar-standar normatif: Ini adalah skema tindakan yang paling penting menurut Parsons.[21]

Dari konsepsi tentang tindakan social dan visi-visi tulisan yang mengatasi batasan tulisan T. Person berniat membeberkan suatu model umum yang bertujuan memahami system social dalam keseluruhanya. Agar sebuah masyarakat bisa stabil dan eksis, maka beberapa fungsi di dalamnya harus terjawab seperti fungsi adaptasi terhadap lingkunganya, agar bertahan lebih lama, lalu mengejar tujuan, karena system akan berjalan atau berfungsi jika di orientasikan mengejar suatu tujuan, integrasi merupakan salah satu bentuk interaksi kelompok yang pada ahirnya membentuk norma .[22]

Pada interaksi tingkat mikro antara ego dan alter-ego yang di definisikan sebagai bentuk system social yang paling mendasar. Ia sedikit sekali mencurahkan perhatian untuk menganalisis tingkat mikro ini, meski ia menyatakan gambaran system interaksi ini tercermin dalam bentuk-bentuk yang lebih kompleks yang di lakukan oleh system social. Parson dengan demikian mendifinisikan system social sebagai berikut : "system social terdiri dari sejumlah actor-aktor individual yang saling berinteraksi dalam situasi sekurang-kurangya mempunyai aspek lingkungan atau fisik, aktor yang mempunyai motifasi dalam arti mempunyai kecenderungan untuk

---

[21] Raho, Bernard, *teori sosiologi modern*, (Jakarta, Prestasi pustaka 2007). Hal : 53-58

[22] Antoni Giddens, Daniel Bell, Micael Forse, etc, *Sosiologi sejarah dan berbagai pemikiranya*, (Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2004) . hal :108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengaoptimalkan kepuasan, yang hubunganya dengan situasi mereka didefinisikan dan didimensi dalam term sistem simbol bersama yang terstruktur secara kultural. Definisi ini mencoba menetapkan system sosial menurut konsep-konsep kunci dalam karya Parsons yakni aktor, interaksi, lingkungan, optimalisasi kepuasan, dan kultur

Meski Parsons berkomitmen untuk melihat system social sebagai sebuah interaksi, namun ia tidak menggunakan interaksi sebagai unit fundamental dalam studi system social. Ia malah menggunakan status peran sebagai unit dasar dari system. Konsep ini bukan merupakan satu aspek dari aktor atau aspek interaksi, tetapi lebih merupakan komponen struktural dari system sosial. Status mengacu pada posisi structural di dalam system social, dan peran adalah apa yang dilakukan aktor dalam posisinya itu, dilihat dalam konteks signifikansi fungsionalnya untuk system yang lebih luas. Aktor tidak dilihat dari sudut pikiran dan tindakan, tetapi dilihat tidak lebih dari sebuah kumpulan beberapa status dalam peran (sekurang-kurangya dilihat dari sudut posisi di dalam system social).

Dalam analisisya system social, parsons terutama tertarik pada komponen-komponen strukturalnya. Disamping memusatkan pada setatus peran, parsons memperhatikan komponen system sosial berskala luas seperti kolektifitas, norma dan nilai, namun dalam analisisnya mengenai system sosial, ia bukan semata-mata seorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

strukturalis, tetapi juga seorang fungsionalis. Ia menjelaskan sejumlah persyaratan fungsional dari system social.

1) System social harus terstruktur (di tata) sedemikian rupa sehingga bisa beroprasi dalam hubungan yang harmonis dengan system lain.
2) Untuk menjaga kelangsungan hidupnya, system sosial harus mendapatkan dukungan yang di perlukan dari system yang lain.
3) System sosial harus mampu memenuhi kebutuhan para aktornya dalam proporsi yang signifikan.
4) System harus mampu melahirkan partisipasi yang memadai dari para anggotanya.
5) System social harus mampu mengendalikan prilaku yang berpotensi mengganggu.
6) Bila konflik akan menimbulkan kekacauan itu harus dikendalikan.
7) Untuk kelangsungan hidupnya system social harus memerlukan bahasa.

Adalah jelas dalam diskusi parsons tentang persyaratan Fungsional system social bahwa ia memusatkan perhatian pada system social yang berskala luas dan pada hubungan berbagai system social yang luas (Fungsionalisme kemasyarakatan).[23]

Pembentukan teori Parsons di tujukan untuk beberapa pemecahan masalah bagaimana cara memahami eksistensi suatu tatanan social yang

[23] George Ritzer, douglas J.Goodman, "*Teori Sosiologi Modern*" (Jakarta, Kencana : 2010). Hal124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terorganisir dalam sebuah masyarakat yang bebas dan mempunyai aktifitas sendiri-sendiri

4. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan, merupakan muatan tentang hasil penelitian yang perna ada. sepanjang upaya penelitian kami melakukan penelusuran hasil-hasil penelitian yang mempunyai kemiripan dan hampir mendekati judul "Kerukunan Beragama dalam Masyarakat Multikultural" yang juga kami teliti.

Adalah milik Bapak Sulhawi Rubba dimana beliau menulis Jurnal yang mempunyai judul "Format Kerukunan Umat Islam di Manggalarang Sidoarjo", penelitian tahun 2005 bertempat di Manglarang Sidoarjo yang mempunyai pembahasan tentang bagaimana para tokoh setempat membentuk atau memformat kerukunan beragama sehingga terjadi kehidupan beragama yang harmonis.

Permasalahan yang diangkat adalah :

Adanya perbedaan mengenai kelompok-kelompok umat islam antara lain Muhammadiyah dan Warga NU tinggal di lingkungan wilayah perumahan Taman Jenggolo Larangan (manggalarang) Sidoarjo. Yang berbeda pemahaman keagamaan dan juga politik ini, menpunyai kerukunan dan dan harmonis.

Metode penelitian yang digunakan adalah :

Dalam penelitianya menggunakan metode deskriftif kualitatif. Untuk menyajikan secara langsung dan menyeluruh dalam latar yang utuh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tokoh agama dan masyarakat merupakan informan kunci. Dalam menggali data, tehnik yang di gunakan adalah penciptaan raport, obserfasi partisipan, wawancara bebas mendalam, catatan lapangan, dan dokumentasi. Reduksi data, displei data, lalu penarikan kesimpulan adalah langkah analisis data penelitian ini. Untuk keabsahan datanya, di gunakan tehnik triagulasi, perpanjangan partisipasi, dan pengamatan mendalam.

Relevansi penelitian tersebut diatas terbukti dengan adanya kesimpulan bahwa :

Kerukunan hidup bagi kelompok-kelompok umat islam di Magalarang telah berjalan selama 18 tahun (1986-2004). Kerukunan tersebut diwujudkan dalam kerjasama di beberapa lembaga social yang mereka bentuk sendiri antara lain : Lembaga Persaudaraan Muslim (LPM), Masjid AlFurqon, Jam'iyah Dzikir, Karang werda dan lainlain, yang kesemua itu terformat sejak lama yang digagas oleh para tokoh agama dan masyarakat yang ada di Magalarang.

Dan yang menjadi berbeda antara penelitian kami dan Bapak Sulhawi Rubba adalah kami meneliti masyarakat yang sangat multikultural perbedaan antara agama etnis dan juga asal daerah individu-individunya. Sedangkan Bapak Sulhawi R. lebih menekankan pada kelompok keagamaan antara Muhammadiyah dan Warga Nahdiyin atau NU, dengan indicator adanya lembaga-lembaga kesehatan, pengajian Ibu-ibu, LPM (Lembaga Persaudaraan Muslim, BAZIS, dan BMT (Baitul Mal wat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tamwil) yang mempunyai tugas untuk mengayomi dan memberikan wadah bagi semua kelompok.[24]

Jadi indikasi kerukunan yang di paparkan oleh Bapak Sulhawi R. adalah terbentuknya kelompok-kelompok organisasi kemasyarakatan yang menjadi wadah masyarakat untuk berinteraksi antar golongan dan kelompok masyarakat dan semua itu terformat atau diciptakan daari beberapa tokoh agama maupun masyarakat yang ada.

[24] Makinuddin,Siti Dalila C, MIftahul A, M. Zaini, Biyanto, M. Yunus N, Sulhawi Rubba,"Qualita Ahsana", Jurnal penelitian ilmu-ilmu keislaman, (April 2005). Hal : 93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id